

Komunikasi Publik Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dalam Penyaluran Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai untuk Warga

¹Aini Salsabila, ²Ellyda Retpitasari, ³Muhammad Faqih,

⁴Hascaria Budi Prasetyo

¹²Institut Agama Islam Negeri Kediri, ³⁴Universitas Mayjend Sungkono Mojokerto
1salsabilaaaini593@gmail.com, 2ellyda@iainkediri.ac.id,
3faqih2896@gmail.com, 4hascariabudiprasetyo89@gmail.com

Abstract

Public communication that is carried out optimally can be used to realize the goals of an organization such as being used for the duties of government employees as public servants and for social assistance activities to the community. This is necessary because public communication affects the relationship between organizations related to social assistance services to people who need social assistance. The purpose of this study is to look at the communication strategy, target accuracy, amount accuracy, supporting and inhibiting factors for the government and related parties. A qualitative approach is the research method used in this study. This method produces descriptive data in the form of spoken or written words from the behavior or people who observe it. The observation technique or observations made in this study were interviews. Researchers use a theory of persuasion. Governments can use the theory of persuasion to implement their non-cash food social assistance programs in an effective way. The results of the study stated that the government's communication strategy was not appropriate in providing non-cash social assistance, causing various problems such as not being on target and also data that was not updated.

Keywords: Strategy; Non-cash Food Assistance; Impact

Abstrak

Komunikasi publik yang dilaksanakan secara optimal bisa dipakai guna mewujudkan tujuan sebuah organisasi seperti digunakan untuk tugas pegawai pemerintah sebagai pelayan publik dan untuk kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan karena komunikasi publik berpengaruh terhadap hubungan diantara organisasi terkait pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan bantuan

sosial. Tujuan dari penelitian ini yakni melihat strategi komunikasi, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, faktor pendukung dan penghambat pemerintah serta pihak-pihak terkait. Pendekatan kualitatif ialah metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini. Metode tersebut menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata lisan atau tertulis dari perilaku maupun orang yang amati. Teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yakni wawancara. Peneliti memakai sebuah teori persuasi. Pemerintah dapat menggunakan teori persuasi untuk melaksanakan program bantuan sosial pangan non tunai mereka dengan cara yang efektif. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum sesuai nya strategi komunikasi pemerintah di dalam memberikan Bansos Non Tunai, sehingga menyebabkan berbagai masalah seperti tidak tepat sasaran dan juga data yang tidak diperbarui.

Kata Kunci: Strategi; Bantuan Pangan Non Tunai; Dampak

PENDAHULUAN

Sebuah negara disebut miskin apabila mempunyai ciri-ciri seperti berikut; memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari dua persen setiap tahunnya) dan memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Kemiskinan ialah satu diantara masalah yang sering kali dialami oleh negara berkembang tanpa terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia belum bisa menyelesaikan atau menghadapi masalah terkait kemiskinan tersebut. Kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah pekerjaan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pergantian pimpinan baik presiden, gubernur ataupun bupati.

Komunikasi memiliki peran penting di dalam penyaluran bantuan sosial pada masyarakat, komunikasi tersebut nantinya akan dilakukan lewat berbagai media. Pemerintah terus melaksanakan berbagai usaha guna memilih serta menyeleksi siapa yang patut menerima bantuan sosial yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Melalui komunikasi, manusia bisa saling terhubung satu dengan yang lain, baik di dalam kehidupan sehari-hari, tempat kerja, pasar maupun di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika komunikasi menjadi aspek penting untuk manusia secara kelompok, organisasi ataupun individu.

Komunikasi publik yang dilaksanakan secara optimal bisa dipakai guna mewujudkan tujuan sebuah organisasi seperti digunakan untuk tugas pegawai pemerintah sebagai pelayan publik dan untuk kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan karena komunikasi publik berpengaruh terhadap hubungan di antara organisasi terkait pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat yang memerlukan bantuan sosial. Apabila komunikasi publik yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai harapan maka tidak akan ada lagi kesenjangan diantara masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan pelayanan bantuan sosial.

BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa pada bulan September persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,22%, sehingga jika dilihat dari persentase tersebut maka pemerintah perlu mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah kemiskinan.¹ Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Peran dari pemerintah diharapkan bisa ikut mengurangi masalah terkait sosial seperti melepaskan segala bentuk kepentingan segelintir elit, penanggulangan kemiskinan di dalam bentuk lainnya yang progresif dan efektif maupun penerapan kebijakan yang mengarah serta menguntungkan masyarakat miskin.²

Kebijakan yang diterapkan nantinya wajib memperhatikan beberapa aspek salah satunya yaitu, peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, implementasi kebijakan yang mengutamakan masyarakat mampu menciptakan kebijakan yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat baik pada peraturan pemerintah daerah maupun peraturan pemerintah pusat. Berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dimulai dari menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yakni, bahwa “dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, kemudian diciptakannya sebuah inovasi program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”.³

Bantuan Pangan Non Tunai disingkat menjadi BNPT ialah sebuah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai. Pemerintah memberikan bantuan pada KPM lewat uang elektronik yang kemudian dipakai guna membeli bahan pangan yang sudah ditetapkan di e-Warong. E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) ialah unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama terhadap bank penyalur dan sudah ditentukan oleh menteri sosial sebagai tempat pembelian serta penarikan bantuan sosial. Selain itu, menteri sosial juga mengikutsertakan berbagai pihak seperti Perum Bulog, masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga tentunya perbankan.

¹ Helvine Gultom, Paulus Kindangen, and George M V Kawung, “Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” 2020.

² Engkus Engkus, “Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong,” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 23, no. 1 (July 17, 2020), <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677>.

³ Ti Aisyah, Cut Sukmawati, and Muhammad Hasyem, “The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance (BPNT Program in the Time Of Covid-19 In Bireuen District,” N.D.

Program dari e-Warong ini diterbitkan supaya penyaluran bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran, kualitas dan juga tepat kuantitas. Pada e-Warong terdapat teknologi komunikasi yang seringkali dipakai yakni, EDC atau mesin Electronic Data Capture. EDC ialah suatu mesin yang digunakan untuk membantu nasabah di dalam melaksanakan transaksi pembayaran. Mesin EDC biasanya terdapat di supermarket, SPBU, ATM, minimarket dan lainnya. Program sembako ialah sebuah program bantuan sosial terkait pangan yang bekerja sama terhadap program BPNT. KPM atau keluarga penerima manfaat ialah keluarga yang sudah ditentukan sebagai penerima bantuan dari program sembako.⁴

Berikut ini merupakan manfaat yang didapatkan melalui BPNT yakni seperti: mempercepat dan mempermudah distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, mengurangi potensi penyelewengan bantuan sosial yang sering terjadi pada distribusi fisik uang tunai, memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial melalui platform digital, mendorong penggunaan teknologi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat, memberikan efisiensi waktu dan biaya administrasi dalam pengelolaan program bantuan sosial.⁵

Program BPNT memiliki prinsip utama yakni, memberikan kendali serta pilihan pada KPM mengenai berapa, jenis, kapan, kualitas, dan harga bahan pangan (telur atau beras) tempat pembelian bahan pangan tersebut yang relevan dengan preferensi, membantu usaha warga untuk mendapatkan pelanggan serta pengoptimalan penghasilan dengan melayani KPM, memberikan akses jasa keuangan pada usaha eceran masyarakat, karena e-Warong bisa mencari berbagai bahan pangan dari berbagai sumber dan mudah digunakan atau dijangkau oleh KPM.

Penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan di Kantor Desa Watudandang pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di dalam bentuk tunai lewat PT. POS INDONESIA untuk periode bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2023 dengan nominal sejumlah Rp. 200.000/KPM/bulan. Serta bantuan subsidi minyak dengan nominal sejumlah Rp. 100.000/KPM/bulan. Data penerima bantuan sudah ditentukan oleh kementerian sosial pusat sehingga pemerintah desa tinggal menyiapkan tempat. Dengan adanya pembagian bantuan tersebut diharapkan bisa membantu sedikit perekonomian masyarakat penerima bantuan. Kemudian selanjutnya untuk

⁴ Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, No. 01 (January 21, 2020): 61–72, <https://doi.org/10.24042/Revenue.V1i01.5762>.

⁵ Assallamu'alaikum Wr Wb, "Bupati Madiun Kata Pengantar," N.D.

pembagian bantuan pangan non tunai tahap empat sampai enam akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023.⁶

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis melaksanakan penelusuran kepada berbagai penelitian yang berhubungan terhadap penelitian yang akan dikaji yakni, Pertama, Mufida (2020) yang berjudul “Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan jenis bantuan menyebabkan adanya kekisruhan serta kebingungan. Kedua, Hirawan (2020) dengan judul “Optimizing the Distribution Of The Social Assistance Program During The Covid-19 Pandemi”. Hasil penelitian menyatakan bahwa distribusi bantuan sosial masih belum maksimal dikarenakan kurangnya persiapan pemerintah didalam menyalurkan bantuan.

Ketiga, Ana Rosaliana, Susi Hardjati dengan judul “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan ketepatan tujuan, pelaksanaan program BPNT (X1) di Kecamatan Wonocolo”. Hasil penelitian dianggap masih belum maksimal, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah setempat kurang terkoordinir, negatif tidak signifikan. Keempat, Putra Joharudin, Septiadi, Maharani, Aisi, & Nurwahyu Ningsih (2020) dengan judul “Panic Syndrom Covid-19: Penekanan terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah”. Hasilnya upaya pemerintah didalam penyaluran bantuan sosial berbentuk BLT (Bantuan Langsung Sosial) kurang diterima di kalangan masyarakat.⁷

Dikutip melalui website resmi Kemenko PMK, pemerintah terus mencanangkan dan memberikan bantuan sosial berupa non tunai pada masyarakat. Mekanisme pemberian bantuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017. Pemberian atau penyaluran dilaksanakan agar terap akuntabel, transparan dan memenuhi prinsip 6T yakni (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat administrasi dan Tepat Sasaran). Akan tetapi di dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak sekali masalah yang butuh untuk sesegera mungkin ditangani oleh pemerintah terkait bantuan sosial.

Andie Megantara selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengemukakan bahwa terdapat berbagai permasalahan terkait pemberian bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan.

⁶ Lilik Rodhiatun Nadhifah and Nur Huri Mustofa, “Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (July 31, 2021): 12, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4510>.

⁷ Anggita Nurafia, Rina Yulianti, And Arenawati Arenawati, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya,” *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)* 4, No. 2 (July 31, 2020), <https://doi.org/10.31506/jipags.V4i2.8709>.

Andi Megantara mengemukakan bahwasanya, terdapat beberapa cara yang bisa dilaksanakan untuk menangani permasalahan terkait bansos diantaranya yaitu, melaksanakan revisi serta ruang lingkup pemakaian Perpres No.63 Tahun 2017 agar mengoptimalkan jangkauan pemanfaatan serta pemberian bantuan sosial. Selain itu, andi juga mengatakan tujuan lain seperti mengoptimalkan peran serta pengendali dari pemerintah daerah di dalam pengendalian dan koordinasi penyaluran bantuan sosial non tunai.

Perbaikan infrastruktur serta digitalisasi bansos ialah sebuah usaha transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan yang relevan terhadap RPJMN 2020-2024. Pada rapat yang dilaksanakan tersebut, dibuat sebuah tim kecil yang memegang tugas masing-masing yakni, central mapper dipegang oleh Bappenas, biaya penyaluran dipegang oleh Kemenko, lampiran Perpres dipegang oleh TNP2K, dan mekanisme penyaluran dan tim pengendali dipegang oleh Kemenko PMK. Ia berharap supaya nanti seluruh elemen lembaga maupun menteri bisa saling membantu dan bekerja sama untuk menangani berbagai masalah terkait bantuan sosial non tunai.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, bisa diambil kesimpulan jika beberapa penelitian sebelumnya hanya menguraikan atau memaparkan mengenai banyaknya kebijakan yang telah pemerintah lakukan berkaitan dengan bansos Covid-19 yang mengakibatkan kekisruhan dan kebingungan masyarakat.⁹ Penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi komunikasi pemerintah dalam Program Bansos Non Tunai dan dampak dari Program Bansos Pangan Non Tunai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif ialah metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini. Metode tersebut menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata lisan atau tertulis dari perilaku maupun orang yang amati. Peneliti mengakumulasi seluruh informasi yang diperoleh menjadi satu. Informasi yang didapatkan yakni berbentuk teks, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dari teks tersebut dan diperoleh analisis deskripsi atau gambaran. Setelah mendapatkan gambaran penelitian kemudian menguraikannya menjadi laporan tertulis. Oleh karena hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang tepat untuk

⁸ Memperoleh Gelar Sarjana, "Implementasi Program Bantua Sosial Tunai (BST) dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020," N.D.

⁹ Ilham Gemiharto and Elfira Rosa Juningsih, "Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung," *Jurnal Manajemen Komunikasi* 6, no. 1 (October 31, 2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>.

digunakan di dalam penelitian ini dengan fokus penelitian pada strategi komunikasi pemerintah dalam Program Bansos Non Tunai.¹⁰

Penelitian kualitatif sendiri memiliki beragam manfaat, salah satunya yakni memberi saran atau rekomendasi mengenai penyelenggaraan metode atau program yang akan dilakukan selanjutnya yang memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan, pemecahan permasalahan dan manfaat sebuah program. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan supaya nantinya didapatkan data yang lebih komprehensif, jelas dan juga efektif. Kemudian peneliti menggunakan metode deskriptif supaya permasalahan maupun fenomena bisa digambarkan dengan jelas, akurat, faktual, hubungan, sifat dan fakta yang diselidiki dapat dideskripsikan secara runtut atau sistematis.¹¹ Teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yakni wawancara. Teknik wawancara dipakai karena untuk memastikan kejadian yang sebenarnya di lapangan, Selain itu juga untuk mendapatkan data maupun informasi yang lebih spesifik. Pihak yang terlibat dalam wawancara tersebut diantaranya yakni satu orang dari Kantor Kecamatan Prambon Tahun 2023 dan dua orang dari masyarakat penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan guna melihat strategi komunikasi pihak terkait, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan faktor pendukung serta penghambat pemerintah.

Data primer dan juga data sekunder ialah sumber data pada penelitian ini. Data primer ialah tindakan maupun kata-kata dari orang yang sedang di observasi/diamati. Data primer yang diperoleh yakni lewat wawancara maupun pengamatan antara pihak penerima dan pelaksana bansos non tunai. Selain dua pihak tersebut pemilik e-Warong dan pendukung lainnya juga diamati atau diwawancarai pada penelitian ini. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan yang mana dua orang atau bahkan lebih saling berhadapan dan peneliti mendengarkan secara seksama apa saja informasi yang disampaikan oleh narasumber.¹²

Data sekunder dapat berupa sumber tertulis yang dijadikan sebagai bahan tambahan yang terdiri dari karya tulis ilmiah, buku, dokumen pribadi, dokumen resmi, serta arsip yang berkaitan terhadap penelitian. Data sekunder yang didapatkan peneliti melalui sumber langsung dan tidak langsung, sumber itu berupa file yang berisi

¹⁰ Noerkaisar, Noni. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 2, No. 1 (June 30, 2021): 83–104.

¹¹ Roy Morado, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di DKI Jakarta," *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 2 (December 29, 2021): 122–37, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.11879>.

¹² Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 2, no. 1 (June 30, 2021): 83–104, <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>.

jumlah penerima manfaat, file pribadi pendamping BPNT, artikel, skripsi, buku, dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi komunikasi ialah sebuah cara yang dipakai oleh perusahaan didalam mewujudkan tujuannya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk memerlukan adanya startegi komunikasi yang baik supaya program yang sudah dicanangkan mampu berjalan dengan semestinya yang dalam hal ini ialah program bansos pangan non tunai. Beberapa strategi komunikasi publik pemerintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan program bansos mereka kepada masyarakat yaitu, *pertama*, menjelaskan tujuan program: Menjelaskan tujuan program bansos dengan jelas dan sederhana sehingga masyarakat dapat mengerti manfaat dan tujuannya.¹³ *Kedua*, melibatkan stakeholder: memperketat keterlibatan stakeholder, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bergerak di bidang sosial, sebagai mitra untuk program bansos, sehingga dapat mengoptimalkan program. *Ketiga*, menggunakan bahasa dan tata cara yang mudah dipahami: Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh target audient. Pemerintah sebaiknya menghindari penggunaan istilah adan macam-macam teknis yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat umum. *Keempat*, mendengarkan umpan balik masyarakat: Masyarakat harus diaktifkan untuk memberikan umpan balik terhadap program bansos. Umpan balik dapat membantu pemerintah memperbaiki program dan menyesuaikan pesan atau taktik komunikasi publik mereka untuk lebih efektif.

Dalam rangka mengkomunikasikan program bansos kepada masyarakat, pemerintah dapat menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk memastikan pesan disampaikan dengan baik dan tujuan program tercapai. Peneliti menggunakan teori persuasi untuk strategi komunikasi publik pemerintah. Teori persuasi adalah studi tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan mempengaruhi orang lain dalam situasi komunikasi. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memainkan peran dalam persepsi, persepsi, dan penerimaan pesan. Dalam teori persuasi, penyampai pesan berusaha meyakinkan penerima pesan dengan maksud untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Beberapa konsep utama dalam teori persuasi termasuk bujukan, otoritas, kepercayaan, emosi, dan perilaku massa. Teknik-teknik seperti persuasi retorika dan pesan subliminal juga berperan dalam studi ini. Sebagai aplikasi praktis, teori persuasi digunakan oleh banyak cabang ilmu sosial dan bisnis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan

¹³ Cristian I R Rengkung, Gustaaf B Tampi, And Very Y Londa, "Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado dalam Penanganan Covid-19," No. 102 (N.D.).

pemasaran. Pemerintah dapat menggunakan teori persuasi untuk mempromosikan program bantuan sosial (bansos) mereka dengan cara yang efektif.

A. Penjelasan Tujuan Program Bansos

Pemerintah menjelaskan tujuan program bantuan sosial non tunai yaitu untuk mempercepat distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat, efektif, dan efisien. Selain itu, tujuan program ini juga untuk mengurangi biaya administrasi dan risiko kecurangan dalam distribusi bantuan sosial. Dengan menggunakan mekanisme non tunai, pemerintah dapat menghindari terjadinya penyelewengan dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Namun, di kecamatan Prambon sendiri ketepatan sasaran BPNT belum relevan terhadap kriteria penerima bantuan, karena pihak kecamatan maupun desa tidak memperbarui data dari masyarakat sementara bansos harus segera untuk disalurkan pada masyarakat.¹⁴

Terdapat juga masalah lain seperti kurangnya wawasan atau pemahaman dari masyarakat mengenai kriteria atau ketentuan penerima bantuan dan juga jenis dari bantuan sosial. Sehingga tidak sedikit terdengar jika antar tetangga saling mengeluh dikarenakan memperoleh bentuk maupun nilai bantuan yang tidak sama padahal mereka merasakan kesulitan yang sama. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka petugas wajib memiliki wawasan terkait pendataan disetiap daerah, wawasan tersebut berupa pemahaman tentang ketentuan serta syarat penerima bansos.¹⁵

B. Penggunaan Bahasa dan Tata Cara yang Mudah Dipahami

Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sangat penting dilakukan untuk menjelaskan program bansos agar pesan tersebut dapat dipahami secara lebih efektif. Dalam program ini, pemerintah kecamatan Prambon memberikan bantuan sosial diberikan melalui transfer elektronik menggunakan kartu prabayar. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan transfer bantuan sosial ke rekening penerima langsung tanpa menggunakan media fisik seperti uang tunai. Akan tetapi, pemerintah juga harus memastikan bahwa jumlah bansos yang diberikan sesuai dengan jumlah bahan pangan di lapangan, sehingga nantinya kebutuhan dari masyarakat bisa dipenuhi.

Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Kuadi sebagai pendamping BPNT kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk seperti berikut

¹⁴ Sri Handayani Suprpto, "Peran Komunikasi Publik dalam Pelayanan Bantuan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango" 4 (2015).

¹⁵ Rengkung, Tampi, And Londa, "Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado dalam Penanganan Covid-19."

“bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan dan juga sudah tepat jumlah, masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan menggunakan cara yaitu, mentransfer sejumlah Rp. 200.000 ke masing-masing rekening penerima bantuan, dari uang tersebut masyarakat tentu bisa membelanjakan berbagai kebutuhan seperti 10kg beras, 6 butir telur, daging ayam per ekor, 120gram ikan abon, dan juga sayur-sayuran”.

Terdapat juga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Duriyat tentang banyaknya uang yang masuk ke rekening KPM. “saya tidak tahu mengenai jumlah uang yang diberikan nak, karena setelah di transfer ke rekening langsung dibelikan telur, daging ayam, minyak dan beras” tuturnya. Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Sumarsih sebagai KPM, beliau berkata “saya tidak mengerti berapa banyak uang yang masuk ke rekening nak, dikarenakan saat Penyaluran saya langsung memperoleh telur, daging ayam, minyak dan sayur”.

C. Melibatkan Stakeholder

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pihak perbankan, pendamping bantuan serta koordinasi teknik ialah mitra untuk Program Bansos Non Tunai di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Beberapa pihak yang sudah disebutkan telah berkoordinasi secara maksimal terhadap pemberian informasi pada KPM, sehingga KPM menjadi lebih paham dan mengerti alur dari bantuan yang disalurkan.

Pada program bansos tersebut, pemerintah menyalurkan bantuannya dalam bentuk sembako yang kemudian ditransfer pada KPM atau keluarga penerima manfaat. Dengan indeks bantuan sejumlah Rp.200.000 per KPM di setiap bulannya. Setiap KPM akan menerima bantuan bansos sembako berbentuk non tunai yang kemudian bisa dibelikan berbagai kebutuhan di warung maupun toko yang sudah bekerja sama terhadap pihak perbankan.

Dengan program bantuan sosial non tunai, pemerintah berharap dapat memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas kesejahteraan sosial. Program tersebut juga diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat transformasi digital Indonesia.

D. Mendengar Umpan Balik dari Masyarakat

Peemerintah harus mendengarkan umpan balik dari masyarakat terkait dengan program bantuan sosial non tunai yang diberikan. Dalam hal ini pemerintah kecamatan Prambon banyak mendapat menerima masukan, kritik, serta saran dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki program bantuan sosial non tunai agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, dengan mendengarkan umpan balik dari masyarakat, pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan sosial yang dilakukan. Sehingga, program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

E. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Bansos

1) Panitia pelaksana

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pendamping bantuan serta koordinasi teknik ialah faktor pendukung Program Bansos Non Tunai di kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk. Beberapa pihak yang sudah disebutkan telah berkoordinasi secara maksimal terhadap pemberian informasi pada KPM, sehingga KPM menjadi lebih paham dan mengerti alur dari bantuan yang disalurkan.

2) Tempat dan lokasi

e-Warong memiliki peran aktif di dalam menyediakan berbagai kebutuhan yang bermutu untuk KPM, sehingga KPM bisa merasakan bantuan yang semestinya. Selain itu, e-Warong juga memiliki peran untuk memberikan edukasi pada KPM saat bantuan sedang berlangsung. e-Warong yang memiliki lokasi strategis menjadi faktor penting pendukung kedua, hal tersebut dikarenakan apabila e-Warong memiliki jarak yang mudah dijangkau oleh KPM, maka KPM tidak akan kesulitan dalam mengambil bantuan yang disalurkan.¹⁶

F. Faktor penghambat Pelaksanaan Program Bansos

Setiap program atau acara yang dilaksanakan pasti terdapat hambatan atau masalah, sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi pun tergantung dengan penyelenggara program atau kegiatan. Pada BPNT sendiri, untuk mencegah atau mengatasi adanya permasalahan maka dibentuk lah tim koordinasi program yang memiliki tugas dalam menyelesaikan adanya masalah terkait bansos. Di bawah ini ialah beberapa faktor yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan Prambon.

1) Kurangnya pengawasan

Sumber Daya Pemantauan ialah faktor pertama yakni, minimnya pengawasan, evaluasi dan pemantauan dari pemerintah setempat. Sumber Daya Pengawasan dari daerah atau pusat ialah faktor kedua yakni minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola data warga kurang

¹⁶ Nurafia, Yulianti, And Arenawati, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya."

mampu, sehingga banyak sekali warga yang kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan.

2) Kurangnya pengetahuan

Sumber Daya Pengetahuan ialah faktor kedua, yakni kurangnya pengetahuan KPM mengenai bansos yang disalurkan, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁷

Setelah mengetahui berbagai masalah terkait bantuan sosial non tunai di kecamatan Prambon, bisa diambil kesimpulan bahwasanya pemerintah sebenarnya sudah berusaha melaksanakan tugasnya. Namun demikian, pengawasan yang dilaksanakan masih belum maksimal sehingga masalah yang lebih besar dapat terjadi akibat ketidakmaksimalan tersebut.

SIMPULAN

Dalam menjalankan strategi komunikasi publik, Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk kurang memperhatikan aspek kesesuaian serta kurang memberikan penjelasan yang akurat mengenai program bantuan sosial non tunai. Selain itu, pemerintah kecamatan Prambon mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang program bansos untuk memperbaiki dan mengoptimalkan nya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan konstitusi terkait bantuan sosial. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal sehingga menyebabkan masalah baru. Hasil penelitian strategi komunikasi pemerintah dalam penyaluran program bantuan sosial pangan non tunai belum sesuai serta dampak dari program tersebut menimbulkan ketidaktepatan sasaran penerima karena kurangnya pengawasan dan masalah data yang tidak update. Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dinilai tidak tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan masih banyak sekali masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan non tunai tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya wawasan bagi para petugas di tiap daerah supaya nantinya bisa mengerti ketentuan dan syarat penerima bantuan sosial.

SARAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan preferensi untuk pengelola Bansos, tidak hanya di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, tetapi juga untuk wilayah lainnya di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya peneliti

¹⁷ Wiwit Wiwit, Muhammad Kamil, and Tri Sulistyanyingsih, "Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu," *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, March 20, 2020, 1–12, <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9379>.

dalam melakukan lebih pendalaman berkaitan dengan Bansos dari permasalahan Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Organisasi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Ti, Cut Sukmawati, and Muhammad Hasyem. "THE EFFECTIVENESS OF THE NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) PROGRAM IN THE TIME OF COVID-19 IN BIREUEN DISTRICT," n.d.
- Engkus, Engkus. "Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 23, no. 1 (July 17, 2020). <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677>.
- Gemiharto, Ilham, and Elfira Rosa Juningsih. "Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 6, no. 1 (October 31, 2021): 1. <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>.
- Gultom, Helvine, Paulus Kindangen, and George M V Kawung. "ANALISIS PENGARUH PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA," 2020.
- Hasimi, Diah Mukminatul. "ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 01 (January 21, 2020): 61–72. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.
- Morado, Roy. "IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DKI JAKARTA." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 2 (December 29, 2021): 122–37. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.11879>.
- Nadhifah, Lilik Rodhiatun, and Nur Huri Mustofa. "Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (July 31, 2021): 12. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4510>.
- Noerkaiser, Noni. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 2, no. 1 (June 30, 2021): 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>.
- Nurafia, Anggita, Rina Yulianti, and Arenawati Arenawati. "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN TEMBONG KECAMATAN CIPOCOK JAYA." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 4, no. 2 (July 31, 2020). <https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8709>.
- Rengkung, Cristian I R, Gustaaf B Tampi, and Very Y Londa. "KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM PENANGANAN COVID-19," no. 102 (n.d.).
- Sarjana, Memperoleh Gelar. "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH

EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM
TAHUN 2020,” n.d.

Suprpto, Sri Handayani. “PERAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO” 4 (2015).

Wb, Assallamu’alaikum Wr. “BUPATI MADIUN KATA PENGANTAR,” n.d.

Wiwit, Wiwit, Muhammad Kamil, and Tri Sulistyaningsih. “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu.” *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, March 20, 2020, 1–12. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9379>.